



**UNIVERSITAS NASIONAL**

**POLITIK RELASI SIPIL – MILITER DALAM REVISI UU NO.3  
TAHUN 2025 TENTANG TNI PADA PENAMBAHAN JABATAN  
PEMERINTAHAN SIPIL BAGI MILITER AKTIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos)**

**MUHAMMAD ALKAFF**

**223501516033**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**MARET 2026**



**UNIVERSITAS NASIONAL**

**CIVIL-MILITARY RELATIONS POLITICS IN THE REVISION  
OF LAW NO. 3 OF 2025 CONCERNING THE TNI IN THE  
ADDITION OF CIVIL GOVERNMENT POSITIONS FOR  
ACTIVE MILITARY**

**SKRIPSI**

**Submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor's degree (S.Sos)**

**MUHAMMAD ALKAFF**

**223501516033**

**POLITICAL SCIENCE STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES**

**MARCH 2026**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alkaff

NPM : 223501516033

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **POLITIK RELASI SIPIL - MILITER DALAM REVISI UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI PADA PENAMBAHAN JABATAN SIPIL BAGI MILITER AKTIF**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan – bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Nasional atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan peraturan yang berlaku di Universitas Nasional. Demikian pernyataan ini saya buat.

Jakarta, 27 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alkaff

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Alkaff

Nomor Pokok Mahasiswa : 223501516033

Program Studi : Ilmu Politik

Kekhususan : Politik Indonesia

Judul Skripsi : **POLITIK RELASI SIPIL - MILITER DALAM REVISI  
UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI PADA  
PENAMBAHAN JABATAN PEMERINTAHAN SIPIL  
BAGI MILITER AKTIF**

Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

**Disetujui untuk diujikan**

Jakarta, 23 Februari 2026

Dosen Pembimbing



Drs. Selamat Ginting, M.I.Kom.

Ketua Prodi Ilmu Politik



Yusuf Wibisono, S.IP., M.Si.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Alkaff

Nomor Pokok Mahasiswa : 223501516033

Program Studi : Ilmu Politik

Kekhususan : Politik Indonesia

Judul Skripsi : POLITIK RELASI SIPIL - MILITER DALAM REVISI  
UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI: ANALISIS  
PENAMBAHAN JABATAN PEMERINTAHAN SIPIL  
BAGI MILITER AKTIF

Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

**Disahkan**  
UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta, 23 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Drs. Selamat Ginting, M.I.Kom.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Asep Vullipiradus, S.I.P., M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Alkaff

Nomor Pokok Mahasiswa : 223501516033

Program Studi : Ilmu Politik

Kekhususan : Politik Indonesia

Judul Skripsi : POLITIK RELASI SIPIL - MILITER DALAM REVISI  
UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI PADA  
PENAMBAHAN JABATAN PEMERINTAHAN SIPIL  
BAGI MILITER AKTIF

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.**

### DEWAN PENGUJI

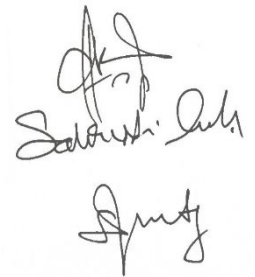
Ketua Sidang : Siti Sadiyatunni'mah, SMB., M.Si.

Penguji 1 : Dr. Sahrudin, S.IP., M.Si.

Penguji 2 / Pembimbing : Dr. Drs. Selamat Ginting, M.I.Kom.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Maret 2026



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan sipil–militer di Indonesia pasca reformasi, khususnya setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi undang-undang tersebut memperluas kewenangan militer, termasuk memberikan peluang bagi prajurit militer aktif untuk menduduki sejumlah jabatan dalam lembaga pemerintahan sipil. Kebijakan ini memunculkan berbagai perdebatan di ruang publik maupun dalam kajian akademik mengenai implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil yang selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang melatarbelakangi revisi UU TNI 2025 serta menilai implikasinya terhadap pola relasi sipil–militer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori hubungan sipil–militer, khususnya konsep objective civilian control dan subjective civilian control yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, serta pemikiran Morris Janowitz dan Peter D. Feaver mengenai profesionalisme militer dan mekanisme pengawasan sipil terhadap institusi militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI 2025 diposisikan oleh pemerintah sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan berkembangnya ancaman keamanan yang bersifat multidimensional. Namun demikian, perluasan peluang bagi militer aktif untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan otoritas sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola relasi sipil–militer di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya berada dalam kerangka objective civilian control, tetapi juga tidak sepenuhnya kembali pada dominasi militer sebagaimana pada masa sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pola hubungan sipil–militer di Indonesia pasca revisi UU TNI 2025 menunjukkan kecenderungan menuju model hybrid civil–military control, yaitu suatu bentuk relasi yang menggabungkan unsur kontrol sipil demokratis dengan keterlibatan terbatas militer dalam struktur pemerintahan sipil. Model ini mencerminkan adanya proses adaptasi institusional dalam menghadapi tantangan keamanan modern, namun pada saat yang sama juga menuntut penguatan mekanisme pengawasan sipil, akuntabilitas demokratis, serta batasan kelembagaan yang jelas agar tidak mengarah pada kemunduran reformasi sektor keamanan di Indonesia.

**Kata Kunci:** relasi sipil–militer, revisi UU TNI 2025, supremasi sipil, *hybrid civil–military control*, demokrasi.

## ABSTRACT

*This research is motivated by the dynamics of civil–military relations in Indonesia in the post-reform era, particularly following the enactment of the revision of Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI). The revision expands the authority of the military, including providing opportunities for active military officers to occupy several positions within civilian government institutions. This policy has generated various debates in the public sphere as well as in academic discussions regarding its implications for the principle of civilian supremacy, which has long been considered one of the fundamental pillars of Indonesia’s democratic system. This study aims to analyze the political dynamics underlying the revision of the 2025 TNI Law and to assess its implications for the pattern of civil–military relations in Indonesia. The research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method through a literature study of policy documents, laws and regulations, and relevant academic literature. The analytical framework of this research is based on civil–military relations theory, particularly the concepts of objective civilian control and subjective civilian control proposed by Samuel P. Huntington, as well as the perspectives of Morris Janowitz and Peter D. Feaver regarding military professionalism and civilian oversight mechanisms over the military institution. The findings indicate that the revision of the 2025 TNI Law is positioned by the government as an effort to adapt to changes in the strategic environment and the emergence of multidimensional security threats. However, the expansion of opportunities for active military personnel to occupy positions within civilian government institutions potentially creates an overlap of authority between military institutions and civilian authorities. This condition suggests that the current pattern of civil–military relations in Indonesia is neither fully within the framework of objective civilian control nor a complete return to military dominance as seen in the pre-reform era. Therefore, this research concludes that the pattern of civil–military relations in Indonesia following the revision of the 2025 TNI Law shows a tendency toward a hybrid civil–military control model, which combines elements of democratic civilian control with limited military involvement in civilian governmental structures. This model reflects an institutional adaptation to the challenges of modern security; however, it simultaneously requires the strengthening of civilian oversight mechanisms, democratic accountability, and clear institutional boundaries in order to prevent a regression in Indonesia’s security sector reform.*

**Keywords:** *civil–military relations, revision of the 2025 TNI Law, civilian supremacy, hybrid civil–military control, democracy.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Pertanyaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Posisi Teoritis Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Konsep Kunci dan Indikator Analisis .....</b>	<b>14</b>
<b>2.4 Kerangka Teori.....</b>	<b>15</b>
<b>2.4.1 Konsep Politik Relasi Sipil – Militer.....</b>	<b>16</b>
<b>2.4.2 Teori Hubungan Sipil – Militer .....</b>	<b>17</b>

2.4.3 Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)	20
2.4.4 Konsep Supremasi Sipil.....	21
2.4.5 Konsolidasi Demokrasi.....	23
2.5 Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Objek dan Fokus Penelitian .....	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4 Teknik Keabsahan Data .....	28
3.5 Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Revisi UU TNI 2025 .....	31
4.2 Konteks Strategis dan Politik Revisi UU TNI 2025.....	32
4.3 Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) .....	35
4.3.1 Penataan Organisasi (1947-1948) .....	42
4.3.2 Perubahan TNI Menjadi APRI .....	43
4.3.3 Perubahan APRI Menjadi ABRI .....	43
4.3.4 Perubahan ABRI Menjadi TNI .....	44
4.4 Pola Relasi Sipil – Militer di Indonesia .....	44
4.5 Fungsi Militer Dalam Sebuah Negara .....	50
4.6 Temuan dan Hasil Penelitian .....	54
4.6.1 Perluasan Peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).54	
4.6.2 Penempatan Prajurit Aktif TNI Pada Jabatan Pemerintahan Sipil....	57

4.6.3 Revisi UU TNI 2025 Dalam Perspektif Supremasi Sipil .....	61
4.6.4 Dampak Relasi Sipil – Militer Indonesia Pasca Revisi UU TNI 2025..	66
4.6.5 Analisis Teori Hubungan Sipil – Militer dan Konsep Sishankamrata	70
4.7 Implikasi Bagi Relasi Sipil – Militer dan Demokrasi Di Indonesia .....	74
4.7.1 Kesimbangan Relasi Sipil – Militer era Modern .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Kerangka Bepikir .....</b>	<b>26</b>
<b>Gambar 2. Soeprijadi .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 3. Urip Sumohardjo .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 4. Jendral Soedirman Dipilih Menjadi Panglima TNI Pertama .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 5 Perbandingan sebelum dan setelah Revisi UU TNI 2025.....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu..... 9**

